

**PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
JANTI SLAHUNG PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**UMMI NURUL AZIZAH**

**NIM. 401190205**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

Azizah, Umami Nurul. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo. Skripsi 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph. D.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kesejahteraan Masyarakat

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dilatarbelakangi adanya ketimpangan pemahaman antara masyarakat desa dengan perangkat desa tentang ketepatan penyaluran BLT sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan perselisihan antara masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*Field Research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dari perangkat desa, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan warga sekitar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo dilihat menggunakan teori George Edward III dengan 4 indikator yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT sudah berjalan dengan baik kecuali pada kejelasan informasi kepada masyarakat terkait bantuan ini masih belum efektif. Adapun faktor kendala dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dan tujuan dari program BLT tersebut sehingga menimbulkan perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah desa janti. Selanjutnya dampak pelaksanaan BLT untuk meningkatkan kesejahteraan ini masih belum maksimal dan efektif karena dana BLT yang terbilang sedikit hanya bisa digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sehingga bantuan ini tidak dapat menutupi ekonomi masyarakat Janti.

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Ummi Nurul Azizah	401190205	Ekonomi Syariah	Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Crabak Slahung Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Agustus 2023

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



**Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.**  
NIP 197801122006041002

Menyetujui:  
Pembimbing,

**Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.**  
NIP 196906241998031002

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Untuk  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung  
Ponorogo  
Nama : Ummi Nurul Azizah  
NIM : 401190205  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

#### Dewan Penguji:

Ketua Sidang :  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.  
NIP. 197506022002121003

Penguji I :  
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin., M.Ag  
NIP. 197207142000031005

Penguji II :  
Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.  
NIP. 196906241998031002

Ponorogo, 03 Juni 2024  
Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP. 197207142000031005

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Nurul Azizah  
NIM : 401190205  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT CRABAK SLAHUNG PONOROGO

secara keseluruhan ialah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 15 Agustus 2023

Pernyataan,



Ummi Nurul Azizah  
NIM 401190205

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bantuan Langsung Tunai adalah penyaluran uang tunai kepada masyarakat yang miskin sebagai reaksi atas meningkatnya harga BBM agar bisa membantu kalangan masyarakat miskin.<sup>1</sup> Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap program kesejahteraan, pemerintah Indonesia memberikan program ini kepada masyarakat miskin. Menurut Edi Suharto, bahwa BLT ini dapat berdampak terhadap masyarakat yang menerima bantuan, dan salah satu dampaknya adalah mampu mendorong pergerakan ekonomi dengan membelanjakan bantuan tersebut.<sup>2</sup> Apalagi pada saat pandemic Covid-19 yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat terutama pada dampak ekonomi yang akhirnya mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi dampak tersebut yaitu salah satunya kebijakan BLT ini.<sup>3</sup> Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pelaksanaan dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai

---

<sup>1</sup> Irwan Akib dan Risfaisal Risfaisal, "Bantuan langsung tunai," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2015): 126.

<sup>2</sup> Ridha Fitri Amelia, "Analisis Dampak Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang" (B.S. thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2022), 3.

<sup>3</sup> Husna Ni'matul Ulya, "Alternatif strategi penanganan dampak ekonomi covid-19 pemerintah daerah Jawa Timur pada kawasan agropolitan," *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2020): 81.

(BLT) untuk keluarga miskin dalam bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM.<sup>4</sup> Masyarakat miskin yang dianggap sebagai RTS harus terkena dampak langsung program BLT-RTS selama pelaksanaannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk secara efektif memantau Rumah Tangga Sasaran yang tentunya akan terbebani oleh kenaikan harga BBM, serta mendorong tanggung jawab sosial bersama.<sup>5</sup>

Pemerintah memberikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan atau menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin dengan berupa pemberian bantuan uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan, yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin.<sup>6</sup> BLT ini pertama kali dilakukan pada tahun 2005, dilanjutkan pada tahun 2009 dan tahun 2013 yang namanya berganti menjadi Bantuan Langsung Tunai Sementara Masyarakat (BLSM).<sup>7</sup> Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu.<sup>8</sup> Walaupun

---

<sup>4</sup> Junaidi Kariono, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 3, no. 1 (2013): 119.

<sup>5</sup> Akib dan Risfaisal, "Bantuan langsung tunai," 127.

<sup>6</sup> Mukarrama Mukarrama, "Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang" (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2022), 18, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24039/>.

<sup>7</sup> Lulu Ilhamdatun, "Program dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19 di Desa Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur" (PhD Thesis, UIN Mataram, 2021), 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

pelaksanaan program ini belum terrealisasi dengan baik, tetapi program BLT masih dijadikan pemerintah sebagai upaya membantu dan meringankan beban masyarakat rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran.<sup>9</sup>

Adapun beberapa konflik yang terjadi pada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu sebagian besar desa telah mendapatkan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang menjadi dasar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Tahun 2023, namun ada temuan PNS masuk data kemiskinan ekstrem. Tentu saja keberadaan nama sejumlah masyarakat yang berstatus PNS dalam data PPPKE itu patut menjadi perhatian serius untuk seluruh desa menentukan layak atau tidaknya seseorang untuk menjadi calon penerima program BLT kemiskinan ekstrem di desa. Menurut Edwar Manurung, SP. mengatakan bahwa, untuk menentukan penerima BLT desa sangat penting berpedoman kepada data PPKE, dari beberapa data tersebut terdapat sejumlah nama masyarakat yang berstatus PNS masuk dalam daftar data PPKE. Dikatakan, bahwa di dalam proses verifikasi data PPKE tersebut desa diminta agar tidak asal menentukan. Aparatur desa segera melaksanakan verifikasi dengan cara langsung ke rumah warga yang bersangkutan dan melibatkan unsur terkait di desa. Jangan sampai calon penerima BLT nantinya tidak tepat sasaran hingga menimbulkan

---

<sup>9</sup> Suharianto, "Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi tentang Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai)," *eJournal Administrasi Negara* 1, no. 4 (2013): 1593–1594.

gejolak di tingkat desa.<sup>10</sup>

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan sosial berupa uang yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di desa tersebut dan rentan dalam menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berdasarkan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan diperuntukkan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah seperti pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup> Adapun besaran yang dianggarkan yaitu paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari anggaran Dana Desa, dengan kriteria KPM BLT-DD sesuai aturan yakni, keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan yaitu Desa Janti dan terdaftar dalam keluarga desil 1 yaitu rumah tangga yang masuk dalam kategori 1-10% dan merupakan tingkat paling rendah kesejahteraan secara nasional, data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> “Data PPKE Masukkan PNS Sebagai Penerima BLT Kemiskinan Eskترم 2023 di Desa,” diakses 2 Februari 2023, <https://radarutara.disway.id/read/645682/data-ppke-masukkan-pns-sebagai-penerima-blt-kemiskinan-eskترم-2023-di-desa>.

<sup>11</sup> JDIH KEMENKEU, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN,” diakses 3 Februari 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/60TAHUN2014PP.HTM>.

<sup>12</sup> Utari Rachmadini, “Terkait Besaran dan Kriteria Penerima BLT-DD Tahun 2023, Ini Penjelasan Kepala DPMD Banyuasin | BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN,” 20 Februari 2023, <https://sumsel.bpk.go.id/2023/02/20/terkait-besaran-dan->

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut George C. Edwards III diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>13</sup> Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada kamunikan. Dimana tujuan dan sasaran harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi kesalahan saat pelaksanaan.<sup>14</sup> Sumber daya, adalah sumber daya yang berwujud sumber daya manusia, seperti implementor dan sumber daya financial.<sup>15</sup> Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan berkomitmen, jujur, dan sifat yang demokratis. Struktur birokrasi merupakan ditentukan salah satu badan bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.<sup>16</sup> Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang dilaksanakan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan.<sup>17</sup> Namun demikian, dilihat dari berbagai faktor diatas faktor yang dominan bagi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan ialah komunikasi antarorganisasi dan

---

kriteria-penerima-blt-dd-tahun-2023-ini-penjelasan-kepala-dpmd-banyuasin/.

<sup>13</sup> George C. Edwards, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980).

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Ibid.,

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Nur Dhillah Haryanti, "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Tahun 2012," 10, diakses 4 Oktober 2023, [http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/03/Jurnal-Dila.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/03/Jurnal-Dila.pdf).

birokrasi pelaksana.<sup>18</sup>

Besaran nilai BLT-DD yang diterima setiap keluarga adalah Rp. 300.000 per KPM pada tahun 2023 setiap bulannya yang akan disalurkan selama 12 bulan. Jumlah penerima BLT-DD di desa Janti Kecamatan Slahung sebanyak 28 KPM. Calon penerima BLT-DD adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaan atau memiliki anggota keluarga yang disabilitas, serta warga yang terdampak ekonomi karena kehilangan pekerjaannya. Selain itu, masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lainnya, seperti PKH, BST, UMKM, Kartu Prakerja, BPNT, dan bantuan sosial lainnya. Pendataan calon penerima BLT-DD di pertimbangkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Penetapan data bagi keluarga miskin di desa Janti Kecamatan Slahung diputuskan bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat dan pelaksanaan pemberian BLT desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.<sup>19</sup>

Sejauh ini pelaksanaan penyaluran BLT-DD kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Janti sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih menyisakan berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pembagian BLT yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial

---

<sup>18</sup> Ibid, 11.

<sup>19</sup> Fika Nurahmawati dan Sri Hartini, "Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak," *JURMA: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif* 4, no. 2 (2020): 166.

masyarakat desa dan juga bisa menimbulkan konflik antar pemerintah desa dan masyarakat desa terjadi. Kecemburuan social tersebut timbul karena masyarakat yang dianggap mampu namun masih mendapatkan bantuan, namun dapat dilihat penerima bantuan langsung tunai tersebut pantas menerima karena yang dianggap lebih mampu adalah anggota keluarga lainnya. Dengan ini, ditakutkan akan menimbulkan konflik dan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menjadi berkurang. Dengan kondisi serba kesulitan menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak ketidakadilan dan perselisihan.

Berbagai permasalahan ataupun kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu diperbaiki, agar tercapainya sebuah keadilan dan diharapkan kepada pemerintah Desa Janti Slahung Ponorogo memberikan arahan yang lebih akurat kepada masyarakat Desa Janti agar masyarakat paham akan tujuan dan proses pemberian BLT tersebut. Walaupun tetap masih ada pro dan kontra terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dimana masyarakat masih ada yang memandang bahwa hal tersebut ada yang belum adil dan sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu berkepentingan untuk meneliti bahwa sebenarnya adil itu sangat penting dalam berbagai hal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penyaluran BLT harus disalurkan secara adil dan merata agar tidak terjadi ketimpangan antar masyarakat.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk**

## **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat Janti Kecamatan Slahung Ponorogo?
2. Bagaimana kendala yang dialami pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Janti?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat Janti?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat Janti Kecamatan Slahung Ponorogo.
2. Untuk menganalisis kendala yang dialami pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Janti.
3. Untuk menganalisis dampak pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat Janti.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan terutama dalam pembahasan mengenai pelaksanaan penyaluran dari program bantuan langsung tunai (BLT) dalam pemerintah, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti

dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Akademik

Diharapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Ponorogo terkait dengan permasalahan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### b. Bagi Lokasi Penelitian

Diharapkan sebagai masukan dan evaluasi bagi perangkat desa dalam memperbaiki dan meningkatkan program subsidi terutama program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga program ini dapat disalurkan secara tepat sasaran.

### c. Bagi Mahasiswa/Peneliti

Diharapkan memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang bagaimana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyalurannya pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan peneliti.

## E. Studi Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Imron Rosidi dengan judul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi

Covid 19”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi BLT pada masyarakat miskin di Desa Suwangi, meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Selanjutnya kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dimaksimalkan fungsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun yang menjadi permasalahan yang dihadapi ialah sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa.<sup>20</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi atau pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah berada pada lokasi penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Sulaiman dengan judul “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar”. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Jadi

---

<sup>20</sup> Rosidi Imron, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi Covid 19” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 89.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada Di Kelurahan Panrannuanku ini tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hanya mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>21</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai bantuan langsung tunai untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini membahas mengenai dampak bantuan langsung tunai.

Skripsi yang disusun oleh Nur Fitri Tsania dengan judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program BLT di Desa Laringgi, terdiri dari empat aspek yaitu (1) Komunikasi, yang terbagi menjadi tiga yaitu pertama transmisi/penyalur komunikasi pemerintah desa sudah efektif dalam penyaluran BLT, kedua kejelasan sosialisasinya sudah merata sedangkan ketiga konsistensinya sudah baik. (2) Disposisi/sikap, sudah cukup baik masyarakat yang mendapat bantuan sangat senang. (3) Sumber Daya meliputi sumber daya manusia yang sudah cukup baik dalam program BLT ini, sarana dan prasarana sudah memadai untuk penyaluran BLT. (4) Struktur Birokrasi, dibagi menjadi dua yaitu SOP dan fragmentasi keduanya sudah

---

<sup>21</sup> M. Y. Sulaiman, “Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Panrannuanku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar,” Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, 2021.

berjalan cukup baik dalam penyaluran BLT di desa Laringgi.<sup>22</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi atau pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu lebih membahas Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin. Sedangkan penelitian ini membahas Implementasi atau Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh Meilana Aulia dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program BLT Dana Desa di Desa Paokmotong ini sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan kebijakan sudah tercapai, tetapi tidak maksimal dikarenakan adanya beberapa indikator dimensi-dimensi pelaksanaan kebijakan program BLT-DD yang kurang dilaksanakan dengan baik seperti data tidak valid atau tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sehingga hal tersebut dapat menjadi ketidaktepatan sasaran.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nur Fitri Tsania, “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022), 88.

<sup>23</sup> Aulia Meliana, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 55, <http://repository.ummat.ac.id/4269/>.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas Implementasi atau Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas implementasi BLT terhadap masyarakat miskin. Sedangkan penelitian ini membahas implementasi BLT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh Ilhamdatun dengan judul “Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat”. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako, karena beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat miskin dengan adanya inflasi akibat covid-19 sehingga biaya kehidupan masih lebih tinggi dibandingkan dana yang diterima dari program BLT.<sup>24</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai untuk kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini objek yang diteliti kajian

---

<sup>24</sup> Ilhamdatun, “Program dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19 di Desa Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.”

terdahulu berfokus pada masa pandemic covid-19.

Skripsi yang disusun oleh Bahhanuddin dengan judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program BLT pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga, meliputi komunikasi ialah sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT dimana tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan TKPKD dan pemerintah desa. Namun ada satu kendala yang dihadapi yaitu sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa.<sup>25</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas Implementasi atau Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian dan BLT diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh Dina Nabilah Putri dengan judul “Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi dana BLT dalam ketahanan ekonomi keluarga di desa Jati Mulyo belum cukup

---

<sup>25</sup> Burhanuddin, “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020” (PhD Thesis, Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram, 2021).

menyeluruh dapat mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat. dari hasil observasi peneliti diperoleh masih banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan berdasarkan pandangan islam implementasi dana BLT telah sesuai dengan dasar-dasar ekonomi islam *sidiq*, *tabligh*, dan *amanah*.<sup>26</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas Implementasi atau Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan perbedaannya pada ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian yang disusun oleh Carly Erly Fernando dalam jurnal dengan judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minasaha Selatan”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.<sup>27</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Sedangkan perbedaannya pada Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan pada lokasi penelitian.

---

<sup>26</sup> Nabillah Putri Diana, “Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (PhD Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>27</sup> Carly Erly Fernando, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minasaha Selatan,” *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020).

Penelitian yang disusun oleh Cecelia Helenia Sasuwuk dalam jurnal dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Sea Kabupaten Minasaha”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan program BLT Dana Desa ini masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan terdapat mala-administrasi dalam pelaksanaannya.<sup>28</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas Implementasi atau Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas implementasi BLT pada masa pandemi. Sedangkan penelitian ini membahas implementasi BLT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh Rahmadani dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan dan BLT Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barowa”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan dan BLT dana desa di desa Barowa sudah berjalan dengan baik dan lancar dan lebih baik dari tahun-tahun kemarin karena sudah ada tim-tim survey yang selalu mengecek keadaan dan kondisi penerima manfaat. Sedangkan untuk dampak yang dihasilkan juga membuktikan bahwa Program Harapan dan BLT dana desa ini sangat membantu masyarakat miskin

---

<sup>28</sup> Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Lengkong, dan Novie Palar, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 108 (2021).

yang menjadikan hidup mereka jauh lebih sejahtera.<sup>29</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan. Sedangkan perbedaannya adalah implementasi Program Keluarga Harapan dan pada lokasi penelitian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa penjelasan melalui kalimat atau kata-kata, maupun berupa gambar bukan penjelasan dengan menggunakan statistic angka.<sup>30</sup>

Kemudian sifat penelitian atau pendekatan penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan serta menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menelusuri fakta tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Data atau informasi yang didapat

---

<sup>29</sup> Rahmadani, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dan Blt Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu" (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022).

<sup>30</sup> Bagus Eko Dono Pd S., Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa. (Guepedia, t.t.), 22.

dijelaskan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan ditampilkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Janti. Alasan peneliti memilih di Desa Janti karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara menemukan bahwa adanya masalah mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya masalah pada BLT di Desa Janti ini dikarenakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat yang ditimbulkan karena ketidakpahaman masyarakat sendiri terkait kriteria penerima BLT. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar adanya tindakan evaluasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat mengenai efektifitas pemanfaatan dana bantuan.

## 3. Data dan Sumber Data

Data merupakan sasaran utama penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesa dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian. Riduwan mengemukakan bahwa perolehan data seyogyanya relevan, artinya ada hubungannya langsung dengan masalah penelitian, mutakhir artinya data yang diperoleh masih hangat

dibicarakan dan diusahakan oleh orang pertama (primer).<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan beberapa informan atau subjek penelitian dan pihak-pihak yang terkait dengan perihal kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada 28 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Janti yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menyediakan data penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh. Menurut Widoyoko menjelaskan bahwa berdasarkan subjek dimana data melekat/sumber data dapat diklasifikasikan menjadi 4 singkatan huruf p (4p) dari bahasa Inggris yaitu Person : sumber data berupa orang, Place: sumber data berupa tempat, Proses: sumber data berupa gerak/aktivitas, dan Paper: sumber data berupa symbol.<sup>32</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari warga dan penanggungjawab BLT di Desa Janti

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara,

---

<sup>31</sup> Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 80.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 82.

pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapinya.<sup>33</sup>

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan / menerima informasi tertentu. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden serta bertanya langsung bertatap muka.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden terkait pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data mengenai catatan, dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, atau agenda. Data-data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dokumentasi juga sebagai data pendukung dari wawancara, observasi, dan juga mendapatkan kumpulan data untuk memperkuat pemikiran dan pendapat terkait pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan konversi data atau memanipulasi data

---

<sup>33</sup> Ibid., 83.

<sup>34</sup> Dr Mamik, Metodologi Kualitatif, 1 ed. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), 108–109.

menjadi bentuk yang informatif sehingga dapat digunakan. Pengolahan data juga bermakna proses menerjemahkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat dari penelitian serta kebutuhan untuk pengambilan keputusan.<sup>35</sup>

Teknik yang dilakukan dalam pengolahan data biasanya terkait dengan jenis data yang telah terkumpul. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan model Milles dan Huberman yaitu pengolahan data dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.<sup>36</sup> Pada tahap ini peneliti mengumpulkan setiap data agar diketahui Bagaimana pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat Janti Kecamatan Slahung Ponorogo, Apa saja kendala yang dialami pada saat penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Janti, dan Bagaimana dampak pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat Janti. Kemudian data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan disatukan dan dilakukan analisis.

---

<sup>35</sup> Amruddin dkk., Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Publica Indonesia Utama, 2022), 137.

<sup>36</sup> M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D). (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), 54–56.

- b. Penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.<sup>37</sup> Pada tahap ini peneliti merangkum seluruh data-data yang kemudian akan dilakukan penyusunan dalam bentuk deskriptif sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Janti Slahung Ponorogo.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang diteliti melalui sumber dan dari segala macam teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut.<sup>38</sup> Teori tersebut bisa berbentuk deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada Kepala desa, perangkat desa, KPM, dan warga sekitarnya. Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Janti Slahung Ponorogo.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data secara kualitatif diungkapkan Sugiyono sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

---

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Ibid.,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>39</sup>

Menurut Milles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik lemah.<sup>40</sup> Ada beberapa tahapan dalam menganalisis data model ini, yaitu:

a. Reduksi data

Peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data sangat banyak dan kompleks. Maka peneliti perlu melakukan analisis data dengan melakukan reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori, dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan, sehingga menghasilkan data yang relevan.

b. Display data (penyajian data)

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtiar, bagan, hubungan antar kategori, pola,

---

<sup>39</sup> Ambarita, Metode Penelitian Sistem Informasi, 91.

<sup>40</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 123.

dan lain-lain, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori, serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

### c. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sememntara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang diambil didukung dengan bukti-bukti yang konsisten, maka kesimpulan tersebut bersifat fleksibel. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan ingin mengetahui pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Janti Slahung Ponorogo. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terkait pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT).

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik tringulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan. Tringulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu

---

<sup>41</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 123.

diluar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.<sup>42</sup>

Tringulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah tringulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data hasil observasi, hasil pekerjaan, dan hasil wawancara yang dilakukan di desa Janti.

#### 8. Sistematis Pembahasan

Sistematika pembahasan di skripsi ini disusun untuk mempermudah pembaca agar dapat memahami secara sistematis. Peneliti harus bisa memposisikan fungsi masing-masing bab agar dapat dipahami secara sistematis. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 6 bab, diantaranya :

**Bab I** adalah pendahuluan. Bab ini berisikan uraian mengenai kerangka dasar penelitian yaitu tentang teori pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masalah melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**Bab II** adalah landasan teori. Bab ini berisi mengenai studi penelitian terdahulu dan kajian teori. Studi penelitian terdahulu berisi mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan kajian teori berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi teori kebijakan publik, bantuan langsung tunai (BLT),

---

<sup>42</sup> Abd Rahman Rahim, Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah (Yogyakarta: Zahir Publishing, t.t.), 114.

dan kesejahteraan masyarakat.

**Bab III** adalah metode penelitian. Bab ini berisi mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan data. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), lokasi penelitian di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung. Kemudian data diperoleh menggunakan data resudi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, lalu analisis data untuk menarik kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

**Bab IV** adalah hasil dan pembahasan. Dalam bab ini berisi mengenai hasil analisis yang berkaitan tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat: gambaran umum Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, sejarah, visi misi, serta pembahasan mengenai analisis penerapan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif islam.

**Bab V** adalah penutup. Bab ini berisi mengenai penarikan kesimpulan dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan serta saran dari peneliti sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat terwujud.

## BAB II

### TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

#### A. Background Teori

Teori kebijakan publik atau *public policy* pertama kali dicetuskan oleh John Dewey. Dalam bukunya yang berjudul “*Logic: The Theory of Inquiry Dewey*” pada tahun 1938. Yang berisi memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijakan, gambaran bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif, dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.<sup>43</sup> Selanjutnya ide John Dewey dikembangkan oleh Harold D. Lasswell yang pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai suatu disiplin yang tidak terpisahkan dari disiplin-disiplin lainnya.<sup>44</sup> Kemudian kebijakan publik semakin dikembangkan lagi oleh beberapa para ahli seperti yang dikemukakan oleh Thomas. Dye mengatakan bahwa “*Public Policy is whatever government choose to or not to do*” yang artinya bahwa kebijakan publik adalah sebuah pilihan pemerintah tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan.<sup>45</sup> Selain itu, pendapat Dye senada dengan yang dikemukakan oleh Edwerd III bahwa kebijakan public adalah “*what government say and do, or not to do. It the goals or purpose of government*

---

<sup>43</sup> John Dewey, *Logic: The Theory of Inquiry Dewey* (New York: Henry Holt and Company, 1938).

<sup>44</sup> Harold D. Lasswell, *Pre-View of Policy Sciences* (New York: American Elsevier, 1971).

<sup>45</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy, Secound Edition* (Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1975), 1.

*programs*” yang artinya kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan.

Kemudian kebijakan publik semakin berkembang dan muncullah pengembangan teori implementasi kebijakan yang dilakukan oleh banyak ahli, baik melalui penelitian mereka maupun melalui publikasi buku dan makalah. Pressman, J.L., dan Aaron Wildavsky mengemukakan teori implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi: How Great Expectation in Washington Are Dashed in Oakland* pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>46</sup> Van Meter dan Van Horn menuliskan dalam bukunya yang berjudul *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* pada tahun 1975.<sup>47</sup> Grindle menerbitkan bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in The Third World* pada tahun 1980.<sup>48</sup> George C. Edwards III menerbitkan bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* pada tahun 1980.<sup>49</sup> Daniel Mazmanian dan Paul

---

<sup>46</sup> Pressman, J.L dan Aaron Wildavsky, *Implementasi: How Great Expectation in Washington Are Dashed in Oakland* (London: California Press, 1973).

<sup>47</sup> Donald Van Meter dan Carl E Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, vol. 6, 4 (Administration and Society, 1975).

<sup>48</sup> Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (London: Jhon Hopkins University Press, 1980).

<sup>49</sup> George C. Edwards, *Implementing Public Policy*.

Sabatie menerbitkan bukunya yang berjudul *Implementation and Public Policy* pada tahun 1983.<sup>50</sup>

Implementasi kebijakan publik boleh dikatakan sudah sangat berkembang. Muncul pada tahun 1970-an sebagai bentuk keprihatinan para ilmuwan administrasi publik atas kegagalan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Federal AS yang dilaksanakan di beberapa Negara bagian, studi implementasi pelan tapi pasti membangun kejelasan fokus kajian, metodologi, dan kerangka teori yang dapat digunakan oleh para ilmuwan tersebut dalam menjelaskan berbagai fenomena kegagalan implementasi kebijakan. Setelah tiga generasi terlampaui, tantangan untuk melakukan implementasi kebijakan yang mampu menjelaskan fenomena implementasi secara akurat semakin berat untuk dilakukan. Berbagai kritikan mulai bermunculan karena inovasi para peneliti terhadap penggunaan metodologi dan teori dalam melakukan studi implementasi kebijakan publik yang ada sekarang ini dianggap jauh dari memadai.<sup>51</sup>

Dari penjelasan terkait tokoh-tokoh yang mengembangkan teori Implementasi Kebijakan beserta nama teori dan bukunya. Peneliti memilih teori George C. Edward III. Teori tersebut relevan dengan topik penelitian yang diteliti dan memiliki dasar empiris kuat. Sehingga dapat membantu memahami fenomena yang sedang dipelajari dan memberikan kerangka

---

<sup>50</sup> Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Amerika Serikat: Scott Foresman, 1983).

<sup>51</sup> "Implementasi Kebijakan," diakses 26 September 2023, [https://etheses.uinsgd.ac.id/5566/4/4\\_bab1.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/5566/4/4_bab1.pdf).

pemikiran yang tepat untuk memecahkan masalah dengan cara diimplementasikan oleh program sebagai bentuk tindakan yang dibuat atau ditetapkan khususnya oleh pemerintah dalam menanggapi masalah sosial. Selain itu, teori ini juga berkaitan dengan pelaksanaan BLT di masyarakat Janti.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Secara etimologi kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*” yang dibedakan dari kata kebijaksanaan maupun kebajikan. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, dan proposal. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.<sup>52</sup> Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Perbedaannya dapat dilihat di pemahaman kebijakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan kebijaksanaan dimaknai sebagai sebuah pengalaman dan pengetahuannya yang juga

---

<sup>52</sup> Maarhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik* (Denpasar: Risalah Bahan Kuliah Huku dan Kebajikan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013), 2.

diartikan dalam kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya.<sup>53</sup>

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Batasan yang diberikan oleh Dye dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah.<sup>54</sup> Pendapat Dye ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Heidenheimer bahwa kebijakan public merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensi dan tindakan aktif dan pasif pemerintah.<sup>55</sup> Selain itu, pendapat Dye senada dengan yang dikemukakan oleh Edwerd III bahwa kebijakan public adalah “*what government say and do, or not to do. It the goals or purpose of government programs*” yang artinya kebijakan public adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap dari proses kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah yang

---

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

<sup>54</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy, Secound Edition*, 1.

<sup>55</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>56</sup> Sedangkan menurut George C. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang cenderung diimplementasikan dengan kurang baik cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.<sup>57</sup>

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan public terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan, dan di evaluasi melalui tahap-tahap.<sup>58</sup> Suatu langkah yang sangat baik dalam proses kebijakan adalah penerapan

---

<sup>56</sup> Donald Van Meter dan Carl E Van Horn, *The Policy Implementation Proces: A Conceptual Framework*, 6:447.

<sup>57</sup> George Edwards, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran* (Yogyakarta: Lukman Offset, 2003), 1.

<sup>58</sup> Hayat dkk., *Reformasi kebijakan publik: Perspektif Makro dan Mikro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 85.

kebijakan. Dalam pelaksanaan, kebijakan hanyalah dokumen yang tidak berguna untuk kehidupan masyarakat atau impian atau rencana yang bagus yang tersimpan dalam arsip dan tidak dilaksanakan. Pemahaman seperti ini juga berasal dari pembagian proses kebijakan publik yang dibagi menjadi beberapa tahap, disitu implementasi berada di tengah-tengahnya.<sup>59</sup>

### 3. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berangkat dari berbagai masalah yang harus diatasi oleh pemerintah yang berkaitan dengan publik. Masalah publik bersifat dinamik sehingga penyelesaiannya diperlukan secara menyeluruh yaitu sebuah pendekatan yang memandang masalah merupakan bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur sendirian. Masalah publik tidak dapat diatasi perorangan dan dikehendaki penyelesaian secara efektif dan efisien yang mensyaratkan sebuah proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan.<sup>60</sup> Konsep implementasi kebijakan publik memuat serangkaian kegiatan atau tindakan yang secara operasional merupakan pedoman dan panduan sekaligus kerangka kerja, melalui cara mana organisasi tersebut dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya baik

---

<sup>59</sup> Elih Yulish, *Implementasi Kebijakan Pendidikan* (Jawa Barat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), 30.

<sup>60</sup> Dr Prihati M.Si, *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018), 66.

mekanisme maupun program dalam memecahkan persoalan public yang dihadapinya.<sup>61</sup>

#### 4. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan yaitu:

##### a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.<sup>62</sup> Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.<sup>63</sup>

##### b. Sumber Daya

Sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Kekurangan atau ketidaklengkapan sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan, dan peralatan akan menyulitkan dalam

---

<sup>61</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi (Kebijakan Publik)* (Bandung: Nusa Media, 2019), 26.

<sup>62</sup> Dr Hernimawati M.Si, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame* (Jakad Media Publishing, 2018), 56.

<sup>63</sup> Dr Syahrudin, S. E. M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus* (Bandung: Nusamedia, 2019), 58.

implementasi kebijakan publik.<sup>64</sup> Ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.<sup>65</sup>

#### c. Disposisi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan disposisi (sikap pelaksana kebijakan) menjadi faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan. Suatu implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif, apabila pelaksana dari kebijakan tersebut mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana cara mengerjakannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan didalam disposisi seperti efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.<sup>66</sup>

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Indra Kertati dkk., *Implementasi Kebijakan Publik : Dari Hulu ke Hilir* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 44.

<sup>65</sup> Dr Syahrudin, S. E. M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik*, 60.

<sup>66</sup> Ravyansah dkk., *Kebijakan Publik* (Sumatera Barat: Get Press, 2022), 69.

<sup>67</sup> Yulia Anggraini, "Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sintang," *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 4 (2020): 6.

### C. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BLT

BLT ini sudah diterbitkan dalam Instruktur Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu di dukung data yang valid dan akurat. Dasar hukum pendataan BLT yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya di desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
4. Peraturan Menteri Keuangan
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri
6. Intruksi Menteri Desa PDPT
7. Surat Menteri Desa PDT
8. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDPT, dan
9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi

Adapun Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Desa Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata. Yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan (PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja)
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Adapun mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta penetapan pendataannya sebagai berikut:

1. Proses pendataan
2. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas
3. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan/atau Gugus Tugas untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT
4. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil
5. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan, atau di tingkat dusun menggunakan aplikasi.<sup>68</sup>

#### **D. Bantuan Langsung Tunai**

---

<sup>68</sup> Bappenas, "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa," diakses 3 Februari 2024, <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2b1/59a/6242b159ae56b332087183.pdf>.

## 1. Pengertian Bantuan Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sejumlah uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga yang perlu dibantu agar kesejahteraannya tidak menurun jika harga BBM dinaikkan.<sup>69</sup> Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.<sup>70</sup>

Bantuan Langsung Tunai diberikan secara khusus untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami krisis ekonomi akibat naiknya harga bahan bakar minyak dunia. Sesuai dengan pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari skema perlindungan sosial. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.<sup>71</sup> Jadi Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh pemerintah agar dapat membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjaga

---

<sup>69</sup> Mohammad Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis. Edisi kedua* (Prenada Media, 2021), 190.

<sup>70</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Pelindungan Sosial di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009), 48.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 160.

keberlangsungan hidupnya.

Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai pun tidak lain adalah untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. Bantuan Langsung Tunai dicairkan setiap triwulan. Bentuk uang tunai diberikan untuk mencegah turunnya daya beli masyarakat miskin yang disebabkan oleh naiknya harga BBM.<sup>72</sup>

## 2. Tujuan Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebagai program kompensasi jangka pendek yang tujuan utamanya adalah menjaga agar tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS), yaitu rumah tangga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan dekat miskin, tidak menurun pada saat terjadi kenaikan harga BBM dalam negeri. Dengan demikian, menurut Departement Sosial RI bahwa program BLT bukan satu-satunya program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, namun diharapkan dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan pada saat terjadi penyesuaian harga kebutuhan pokok menuju keseimbangan yang baru. Selain itu juga ada tujuan dari program bantuan langsung tunai bagi rumah tangga sasaran lainnya, antara lain :

- a. Membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

---

<sup>72</sup> Ade Taufan, "Peran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik Pada Masa Pandemi Tahun 2022," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 10 (2022): 2578.

- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.<sup>73</sup>

### **E. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

#### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara produktif, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan nilai tambah.<sup>74</sup>

#### **2. Perumahan dan permukiman**

Perumahan dan permukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam perannya

---

<sup>73</sup> Mohammad Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, 190.

<sup>74</sup> Hanik Fitriani, "Pemberdayaan Ekonomi Disabilitas Melalui Batik Ciprat," *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 118.

sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman dapat menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga Negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan lokasi geografis.

### 4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat sekaligus keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid., 19.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI**  
**UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**  
**JANTI SLAHUNG PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Masyarakat dan Desa Janti**

1. Kondisi Geografis Desa Janti Kecamatan Slahung

Desa Janti merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Desa Janti ini merupakan desa paling utara dari wilayah Kecamatan Slahung dengan ketinggian sekitar 142 M di atas permukaan laut dan luas wilayahnya adalah 212,24 hektare. Batas-batas wilayah Desa Janti adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Desa Bulu Kidul
Sebelah Timur	Desa Gombang
Sebelah Selatan	Desa Duri
Sebelah Barat	Desa Ngilo-ilo

Desa Janti membagi wilayahnya menjadi tiga dusun yaitu, Dusun Pilang, Dusun Blimbing, Dusun Krajan. Setiap dusun memiliki potensi yang berbeda dan mendapat penanganan langsung masyarakat. Desa ini adalah desa dengan bentang wilayah dataran rendah di Kecamatan Slahung, walaupun sebagian besar wilayah Kecamatan Slahung adalah dataran tinggi. Penduduk di Desa Janti ini mayoritas di kelas ekonomi menengah kebawah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain

petani mereka juga terkenal dengan pedagang, penjahit, peternak ayam, dan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian maka bekerja sebagai buruh harian lepas. Mayoritas penduduk di Kelurahan Janti masyarakatnya beragama islam<sup>76</sup>

## 2. Kondisi Demografi dan Administrasi Desa

Jumlah penduduk di Desa Janti adalah sebanyak 2036 jiwa. Dari jumlah tersebut masyarakat desa hidup dengan kondisi yang beragam, antara lain ada yang tergolong berada dalam garis kemiskinan dan garis rentan miskin. Secara topografi Desa Janti memiliki luas wilayah 212,24 Ha yang terdiri dari 146,53 Ha area persawahan, 65,71 Ha area non pertanian. Dari data pembagian luas tanah yang ada di Desa Janti tersebut, paling besar tanah di desa tersebut adalah pertanian.<sup>77</sup>

## 3. Kondisi Ekonomi dan Sarana Prasarana

Kondisi perekonomian penduduk Desa Janti dapat dikategorikan masyarakat dengan ekonomi kelas bawah menengah, namun ada beberapa warga yang berstatus ekonomi rendah dengan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan petani serabutan. Desa Janti memiliki lahan persawahan yang luas dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Selain itu juga ada para wanita yang sudah atau belum menikah memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri demi menyambung perekonomian keluarga. Masyarakat Desa Janti

---

<sup>76</sup> “Dokumen Profil Desa Janti Tahun 2021,” t.t.

<sup>77</sup> “Dokumen Profil Desa Janti Tahun 2021.”

memiliki kelompok usaha tani makmur yang bekerjasama dengan koperasi desa demi meningkatkan pemasukan warga. Selain sektor tani, juga terdapat beberapa usaha seperti usaha pembuatan tempe, jasa penjahit, pembuatan aneka makanan/ *snack home industry*, pedagang, dan peternakan.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Janti secara langsung terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula. Sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani. Peternakan dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan lain-lain.<sup>78</sup>

## **B. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Janti Kecamatan Slahung Ponorogo**

Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menggunakan teori George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan Disposisi.

### **1. Komunikasi**

#### **a. Transmisi**

Proses transmisi yang dilakukan di Desa Janti ini melalui musyawarah desa yang nantinya akan disampaikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Hal ini dikemukakan oleh Ibu Nur bahwa

---

<sup>78</sup> “Dokumen Profil Desa Janti Tahun 2023,” t.t.

“Untuk penyebaran informasi sendiri kami langsung membagikan melalui grup wa MUSDESUS (Musyawarah Desa Khusus) yang kemudian akan dirapatkan dan diberitahukan informasinya kepada KPM Desa Janti dengan mempertimbangkan siapa saja nama-nama yang memenuhi syarat sebagai penerima BLT”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku aparat desa Janti dapat disimpulkan bahwa upaya pembagian informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah menunjukkan adanya sistem komunikasi yang efektif, seperti yang ditunjukkan oleh upaya pemerintahan desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa Janti.

- b. Kejelasan informasi sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga harus dikomunikasikan dengan jelas agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris desa Janti Ibu Nur yang mengatakan bahwa:

“Aparatur desa terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan BPD, pemerintah desa, dan kepala dusun RT/RW setelah pemberitahuan melalui media sosial dari aplikasi WA yang kemudian hasilnya nanti akan disampaikan kepada warga penerima bantuan langsung tunai”.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Nur, *Wawancara*, 3 Oktober 2023.

<sup>80</sup> Nur.

Sedangkan kejelasan komunikasi dari sisi masyarakat yang sudah dilakukan wawancara oleh peneliti yaitu KPM Bapak Rifki Roi Abidin:

“Sebelumnya saya tidak mengetahui kalau saya mendapatkan bantuan BLT, saya baru mengetahuinya pada saat ada salah satu perangkat desa datang ke rumah saya dengan memberikan satu surat dan memberikan pengarahan bahwa saya mendapatkan bantuan BLT tersebut dan syarat-syarat yang harus dibawa saat pengambilan bantuan BLT tersebut”.<sup>81</sup>

- c. Konsisten merupakan indikator ke tiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimana perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas jika implementasi kebijakan ingin berhasil. Konsisten ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respons dari aparat pelaksana dalam memahami pedoman yang dilaksanakan dengan benar. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris desa:

“Sebagai pemerintahan desa kita tetap konsisten dan penyalurannya itu tepat sasaran karena dalam pertemuan musyawarah bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja banyak yang kami undang diantaranya kepala dusun RT/RW, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya untuk memilih siapa yang layak atau tergolong sebagai penerima bantuan tersebut”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa konsisten sangat penting untuk keberhasilan

---

<sup>81</sup> Rifki Roi Abidin, *Wawancara*, 3 Oktober 2023.

<sup>82</sup> Nur, *Wawancara*, 3 Oktober 2023.

program Bantuan Langsung Tunai. Selain itu, penyaluran bantuan harus tepat sasaran karena banyak masyarakat yang protes dan menimbulkan kecemburuan sosial karena tidak menerima bantuan tersebut.

Selain itu, penerimaan bantuan BLT tidak tepat waktu menjadi salah satu kendala yang sangat penting diperhatikan oleh pemerintah. Tidak tepat waktu ini disebut bahwa pemberian bantuan BLT tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Hal ini menjadi sangat penting karena ketepatan waktu adalah tolak ukur masyarakat telah merasakan manfaat dari program BLT tersebut dengan ketidaktepatan waktu maka program bisa saja tidak dapat berlanjut sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga bantuan BLT menjadi tidak efektif. Berikut wawancara dari Bapak Saikun selaku penerima KPM:

“Bantuan BLT yang diterima selalu tepat waktu karena pemerintah desa sebelum jauh hari mendekati pelaksanaan penyaluran BLT tersebut pemerintah desa sudah mempersiapkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan”.<sup>83</sup>

## 2. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berhasil jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Menurut Edwards III, sumberdaya

---

<sup>83</sup> Saikun, *Wawancara*, 18 Oktober 2023.

adalah faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen saja. Sumber daya manusia, seperti kemampuan implementor dan sumber daya keuangan, dapat menjadi bagian dari sumber daya tersebut. Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk memperlancar proses penyaluran bantuan langsung tunai di desa Janti. Dalam program ini, semua staff desa terlibat langsung dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa:

“Semua staf terlibat di dalam pelaksanaan penyaluran BLT tersebut. Yang terlibat seperti kepala dusun, akan tetapi yang lebih penting yaitu kasi keuangan karena peran kasi keuangan bertanggung jawab dalam program ini, untuk staf lainnya hanya membantu”.<sup>84</sup>

Selanjutnya dilakukan wawancara kepada pihak sekretaris desa Janti

Ibu Nur:

“Saat dilakukan penyaluran bantuan ini ada 28 masyarakat desa yang terpilih menerima bantuan BLT tersebut”.<sup>85</sup>

**Tabel 3.1**<sup>86</sup>

**Nama Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana  
Desa**

<sup>84</sup> Edi Prayitno, *Wawancara*, 17 Oktober 2023.

<sup>85</sup> Nur, *Wawancara*, 17 Oktober 2023.

<sup>86</sup> “Dokumen Profil Desa Janti Tahun 2023.”

NO	NAMA	ALAMAT
1	MISDI	PILANG 01/02
2	TUKIYEM	PILANG 01/02
3	KATEMI	PILANG 01/02
4	UNTUNG	PILANG 03/02
5	SATI	BLIMBING 01/01
6	PANIRAN	BLIMBING 01/01
7	SAIKUN	BLIMBING 01/01
8	TOIMIN	BLIMBING 01/01
9	YAIMAH	BLIMBING 01/01
10	TUTIK SETIORINI	BLIMBING 01/01
11	KADEMIN	BLIMBING 01/02
12	KATIMUN	BLIMBING 01/02
13	LAMAN	BLIMBING 02/01
14	NYAMAN	BLIMBING 02/01
15	PONIRAN	BLIMBING 02/01
16	RIFKI ROI ABIDIN	BLIMBING 02/01
17	PARTUN	BLIMBING 02/01
18	WAGINEM	BLIMBING 02/02
19	JEMANI	BLIMBING 02/02
20	DJAMAN	BLIMBING 03/01
21	KADIS	BLIMBING 04/01
22	MARPI	KRAJAN 01/01
23	SUYATMO	KRAJAN 01/01
24	MARIATI	KRAJAN 01/01
25	SARTINI	KRAJAN 01/02
26	SUDARSI	KRAJAN 02/02
27	LAMI	KRAJAN 03/02
28	SUHARNO	KRAJAN 03/02

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa penyaluran program bantuan langsung tunai sebanyak 28 masyarakat miskin yang menerima bantuan langsung tunai dari tiga dusun.

### 3. Struktur Birokrasi

a. SOP adalah panduan yang berupa dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu tugas dengan tujuan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Sehingga dalam kebijakan ini SOP sebagai proses atau langkah-langkah yang diambil untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai oleh pemerintah desa. Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa:

“Untuk tahap pencairan, pertama-tama kami harus menyelesaikan laporan realisasi pada penerimaan sebelumnya. Setelah selesai, kami akan mengajukan berkas persyaratan yang diminta oleh pemerintah desa yang kemudian akan dikirim ke pusat. Setelah dana masuk ke pemerintahan desa, ada beberapa langkah yang harus diikuti yaitu harus ada SPP dan kasi kaur. Setelah semua persyaratan sudah lengkap, maka dana akan dicairkan dan akan diadakan penerimaan BLT”.<sup>87</sup>

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Mutijab selaku Staff Keuangan:

“Untuk syarat dalam penyaluran bantuan langsung tunai yang dilakukan di desa Janti ini kami hanya memerlukan KK, KTP,

---

<sup>87</sup> Nur, *Wawancara*, 17 Oktober 2023.

dan sertifikat vaksin yang kemungkinan sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan”.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa SOP ini sangat membantu pemerintah desa Janti dalam proses penyaluran atau pencairan dana bantuan langsung tunai. Sehingga bisa dikatakan penyaluran bantuan di desa ini dilakukan dengan baik, adil dan tepat sasaran.

b. Fragmentasi

Fragmentasi atau kerjasama merupakan hal yang penting untuk tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan, dimana penyebaran tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dibagi tanpa tumpang tindih dengan tetap membagi tugas secara menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak organisasi. Hal ini akan menimbulkan dampak yang signifikan yang akan merugikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa:

“Tentu saja, dalam struktur birokrasi di pemerintahan desa Janti pastinya semua staf sudah sesuai dengan bidangnya masing-

---

<sup>88</sup> Mutijab, *Wawancara*, 20 Oktober 2023.

masing, contohnya di bagian pelayanan Ibu Lastri melayani masyarakat dalam hal persuratan”.<sup>89</sup>

Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di desa Janti sudah dilakukan dengan baik karena penyaluran bantuan langsung tunai ini sudah disusun dengan rapi dan dijalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing staf desa.

#### 4. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat penting dalam melihat bagaimana kebijakan publik diterapkan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka mereka harus tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Berikut hasil wawancara peneliti: Tentu saja masyarakat senang dengan adanya program bantuan langsung tunai ini karena masyarakat menjadi terbantu walaupun itu tidak membantu sepenuhnya kebutuhan pokok masyarakat.<sup>90</sup>

Dilanjutkan dengan pernyataan dari Ibu Sati salah satu masyarakat penerima bantuan langsung tunai:

“Saya sangat senang dengan adanya program bantuan langsung tunai ini karena dengan adanya bantuan ini bisa membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan makanan ataupun keperluan lainnya”.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Edi Prayitno, *Wawancara*.

<sup>90</sup> Misdi, *Wawancara*, 20 Oktober 2023.

<sup>91</sup> Sati, *Wawancara*, 20 Oktober 2023.

Berikut kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa Masyarakat sangat mendukung pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini karena bantuan tersebut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan tersebut menjadi sedikit tambahan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Janti.

### **C. Kendala Yang Dialami Pada Saat Penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) Di Desa Janti**

Dalam pelaksanaan program BLT di desa Janti terdapat sedikit kendala. Kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah desa tersebut hanya beberapa saja. Kendala-kendala yang terjadi tidak memberikan permasalahan yang besar terhadap penyaluran BLT. Beberapa kendala tersebut terjadi dikarenakan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut kepala desa Janti kendala yang dialami tersebut terjadi karena konflik masyarakat desa Janti yang tidak terima karena masyarakat yang dianggap mampu menerima bantuan sedangkan yang dianggap tidak mampu tidak menerima. Berikut wawancara yang telah dilakukan oleh Kepala Desa:

“Gini lo mbak, di desa Janti itu masyarakatnya tergolong masyarakat yang rata-rata ekonominya stabil. Dapat dikatakan stabil karena semua masyarakat di desa Janti ini banyak yang berhasil ekonominya maksud dari kendala yang terjadi tersebut bahwa penyaluran BLT ini sedikit menimbulkan kecemburuan social antara masyarakat satu dengan yang lainnya bahwa dari pandangan mereka terdapat salah satu warga yang tidak terima bahwa seorang yang

mendapatkan bantuan dianggap mampu yang sebenarnya yang mampu adalah anggota keluarga lainnya”.<sup>92</sup>

Kemudian wawancara yang dilakukan oleh masyarakat penerima BLT yaitu dari Bapak Jemani Mengatakan bahwa:

“Saya sebagai penerima BLT saya sering ditanyai tetangga saya mengapa saya kok dapat bantuan ini padahal menurut mereka rumah saya bagus, punya sawah tapi yang mempunyai semua itu adalah hasil kerja keras anak-anak saya bukan milik saya pribadi”.<sup>93</sup>

#### **D. Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Janti**

Meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu tidak meningkatkan daya beli masyarakat miskin secara langsung, akan tetapi program itu sangat membawa manfaat bagi mereka. Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat yang menerima BLT bahwa penggunaan Bantuan Langsung Tunai ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Karena jumlah yang sangat minim tidak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup atau pengembangan sebuah usaha. BLT adalah subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tertentu untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan minimal. Penerimaannya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah. Pada dasarnya, Bantuan Langsung Tunai adalah program subsidi pemerintah untuk membantu meringankan

<sup>92</sup> Edi Prayitno, *Wawancara*.

<sup>93</sup> Jemani, *Wawancara*, 18 Oktober 2023.

kesulitan masyarakat miskin. Berikut wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Tikimun menegaskan:

“Memang bagus bahwa program BLT membantu orang miskin, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan pokok. Namun, jika saya ditanya apakah BLT berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut saya dengan apa yang saya lihat sehari-hari tidak ada perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup atau peningkatan kesejahteraan masyarakat KPM. Ada tetangga saya yang mendapatkan BLT, kondisi hidup mereka tetap tidak ada perubahan. Karena keadaan mereka sulit diperbaiki dengan bantuan yang sangat sedikit”.<sup>94</sup>

#### 1. Pendapatan

Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat pendapatan atau penghasilan. Aspek kesejahteraan masyarakat akan diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Indikator objektif bisa dilihat dari kecukupan penghasilan dari pendapatan perkapita rumah tangga. Dimana rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, maka kesejahteraan akan menjadi lebih baik. Sedangkan indikator subjektif dilihat berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup, maka bisa dikatakan bahwa kesejahteraannya baik. Dalam penelitian ini menggunakan indikator subjektif yang dilihat dari variabel pendapatan. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemic covid-19 mampu membantu masyarakat

---

<sup>94</sup> Tikimun, *Wawancara*, 20 Oktober 2023.

desa Janti untuk menambah pendapatan dan memenuhi kebutuhan. Bapak Paniran selaku KPM ketika diwawancarai mengemukakan bahwa:

“Pada saat pandemic covid-19 memang sangat berdampak bagi keluarga saya. Saya hanya bekerja sebagai buruh dimana pendapatan saya perbulannya tidak menentu. Itu juga pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari apalagi belum ditambah dengan kebutuhan lainnya seperti biaya listrik dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini saya merasa bersyukur karena bisa membantu dan sedikit meringankan kami untuk memenuhi kebutuhan pokok, walaupun tidak membantu sepenuhnya dalam keluarga saya”.<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara lain dilakukan oleh Ibu Marpi selaku KPM sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai tukang pijit, segala kebutuhan saya ambil dari hasil kerja ini. Apalagi ada pandemi ini pekerjaan saya jadi sepi yang mengakibatkan adanya penurunan pendapatan dari sebelumnya. Dan saya mendapatkan BLT, dari situ saya sangat senang karena itu sangat membantu saya yang tadinya saya kesulitan. Saya mempunyai dua anak jadi kebutuhan sehari-hari tetap harus terpenuhi”.<sup>96</sup>

Dari wawancara yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat membantu masyarakat desa Janti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang awalnya merasa kekurangan dan kesulitan saat pandemi covid-19 setelah adanya BLT mereka merasa cukup dan terbantu untuk kebutuhan pokoknya. Dan dana

---

<sup>95</sup> Paniran, *Wawancara*, 3 Oktober 2023.

<sup>96</sup> Marpi, *Wawancara*, 3 Oktober 2023.

BLT ini tidak bisa digunakan oleh KPM dalam hal lainnya seperti sebagai modal usaha. Sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat di desa Janti masih kurang.

## 2. Tempat Tinggal Keluarga

Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat keadaan tempat tinggal, apakah layak huni atau tidak. Dengan kata lain, masyarakat yang sejahtera pasti akan memiliki tempat tinggal yang luas dan mewah karena ini akan menentukan sejauh mana masyarakat tersebut dipandang oleh masyarakat lain. Kepemilikan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi rumah tangga. Tidak diragukan lagi, tingkat kepuasan masyarakat yang tinggal di rumah sendiri akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di rumah keluarga. Tempat tinggal penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Janti sudah lebih baik karena tempat tinggal sudah milik sendiri, meskipun jenis rumah yang dihuni beragam dan sederhana. Ada beberapa KPM yang masih menumpang dengan orang tuanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Nyaman, beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian BLT ini cukup sangat membantu kak, walaupun waktu pemberiannya tidak pasti namun saya sangat bersyukur dapat menerima BLT ini. Saat saya menerima BLT ini saat itu juga langsung saya gunakan untuk membeli kebutuhan selebihnya sisa uang BLT saya gunakan untuk tambahan modal usaha saya, sebelumnya saya sudah mempunyai usaha jualan es didepan rumah. Saya membuka usaha tersebut supaya setiap harinya ada pemasukan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan saat ini

saya masih ikut tinggal bersama orang tua oleh maka dari itu saya harus mandiri”.<sup>97</sup>

### 3. Pendidikan

Saat ini, pendidikan dijadikan sebagai kebutuhan yang sangat diperlukan. Salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga adalah status pendidikannya karena dapat digunakan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan anak dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih berfokus pada kemampuan keluarga untuk membayar sekolah anak mereka. seperti yang dikatakan ibu Tutik Setiorini saat diwawancarai di rumahnya. Beliau mengatakan bahwa:

“Suami saya hanya bekerja sebagai buruh tani, dengan gaji yang rendah dan pekerjaannya yang tidak menentu. Alhamdulillah saya menerima dana BLT ini. Dengan dana ini, kami gunakan untuk membeli sembako seperti beras, minyak, dan lainnya. Saya akan menggunakan sisa uang untuk membayar SPP anak sekolah jika ada.”<sup>98</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Sartini, beliau mengatakan bahwa:

“Dana bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama bagi saya yang hanya bekerja sebagai buruh. Jika ada pekerjaan di ladang orang, saya bekerja, jika tidak ada, saya tidak bekerja.

---

<sup>97</sup> Nyaman, *Wawancara*, 20 Oktober 2023.

<sup>98</sup> Tutik Setiorini, *Wawancara*, 4 Oktober 2023.

Manfaat dana BLT ini sangat membantu untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya, meskipun tidak cukup untuk menyekolahkan anak saya”.<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara peneliti diatas bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tidak cukup atau belum efektif untuk biaya kebutuhan anak. Dengan kata lain BLT ini hanya cukup digunakan untuk kebutuhan pokok saja.

#### 4. Kesehatan

Indikator tambahan yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kepemilikan berbagai jenis asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan sebagainya. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap jaminan kesehatan, seperti asuransi kesehatan, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdapat masyarakat yang menggunakan uang BLT untuk berobat. Karena ada salah satu informan dari masyarakat penerima bantuan BLT yaitu Ibu Mariati mengatakan bahwa:

“Bantuan BLT ini sangat membantu bagi saya yang hanya bekerja sebagai buruh, selain untuk kebutuhan apabila ada sisa BLT ini juga saya gunakan untuk tambahan uang berobat saya”.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Sartini, *Wawancara*, 4 Oktober 2023.

<sup>100</sup> Mariati, *Wawancara*, 18 Oktober 2023.

Dari hasil wawancara informan yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, tempat tinggal keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih banyak digunakan untuk pendapatan yang dihitung berdasarkan kecukupan untuk kebutuhan sehari-hari



**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**  
**TERHADAP PELAKSANAAN BLT DI DESA JANTI**  
**SLAHUNG PONOROGO**

**A. Analisis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Janti**

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang muncul setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan diantaranya upaya mengelola *input* untuk memperoleh hasil *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.<sup>101</sup> Implementasi kebijakan menggabungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil dari aktivitas pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi ialah membentuk jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik terlaksana melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>102</sup> Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, ketentuan mengenai kriteria, teknik pendataan, penetapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT desa dan pelaksanaan pemberian BLT desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan

---

<sup>101</sup> Haedar Akib, "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1.

<sup>102</sup> Ibid, 2.

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.<sup>103</sup> Menurut Edwerd III implementasi kebijakan dibutuhkan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwerd III memperkenalkan 4 aspek atau pendekatan yang diduga memperkuat kontribusi pada pelaksanaan kebijakan. Keempat aspek tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.<sup>104</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, komunikasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai di desa Janti masih kurang tersosialisasi dengan baik. Terutama pada kejelasan informasi antara pemerintah desa dengan KPM masih kurang efektif, dimana KPM sebelumnya tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan bantuan. Penerima bantuan hanya diberikan undangan untuk pengambilan uang tidak dijelaskan dengan detail terkait program ini sehingga tidak mengerti tentang tujuan atau arahan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini.

##### a. Transmisi

---

<sup>103</sup> “Kementerian Keuangan,” diakses 25 September 2023, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/40~PMK.07~2020Per.pdf>.

<sup>104</sup> George C. Edwards, *Implementing Public Policy*.

Transmisi merupakan penyaluran atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh staff desa.<sup>105</sup> Aspek komunikasi pada aparatur desa dengan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di desa Janti. Kebijakan program BLT ini harus dijalankan dan di pahami secara baik oleh aparatur desa yang bekerja dalam hal ini khususnya di desa Janti dan disosialisasikan kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Penyaluran komunikasi yang dilakukan desa Janti masih belum efektif karena mereka menyampaikan hanya melalui grub WA musyawarah desa yang nantinya akan disampaikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan mendatangi langsung penerima bantuan tersebut.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kebijakan yang telah disampaikan oleh kepala desa terhadap pemerintah desa, dan kepala dusun RT/RW yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kejelasan merupakan bagaimana komunikator untuk menyampaikan pesannya secara jelas sehingga tercapailah tujuan komunikasi dengan sampainya pesan kepada komunikan.<sup>106</sup> Di desa Janti masih belum memberikan informasi dengan jelas dan transparan pada setiap perubahan kebijakan yang terjadi. Dimana staff desa

---

<sup>105</sup> Ibid.,

<sup>106</sup> Ibid.,

membagikan informasi kepada KPM secara langsung hanya dengan memberikan surat dan pengarahan terkait pengambilan dana bantuan tidak menjelaskan dengan detail terkait program BLT sehingga masyarakat masih kesulitan memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa Janti.

c. Konsisten

Pada saat penyampaian informasi harus bersifat konsisten atau tetap. Karena hal ini berpengaruh terhadap proses pelaksanaan. Terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program BLT, seperti perubahan kebijakan, perubahan substansi program atau disebut *human error*. Konsistensi dalam komunikasi jangka panjang waktu tertentu sangat berfungsi dalam memperbarui informasi sehingga pelaksanaan dapat berkesinambungan dengan baik serta pelaku dapat paham dengan tindakan apa yang akan dilakukan.<sup>107</sup>

Konsistensi sangat diperlukan agar kebijakan yang akan diambil tidak salah paham sehingga nantinya membingungkan pelaksanaan kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Janti sudah konsisten hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan bahwa di desa Janti telah

---

<sup>107</sup> Ibid.,

melaksanakan penyaluran BLT sesuai ketentuan. Banyak warga yang protes karena tidak mendapatkan bantuan, namun siapa saja yang menerima BLT sudah di tentukan sesuai dengan data yang di tentukan.

## 2. Sumber Daya

Pelaksanaan sistem informasi diperlukan adanya sumber daya yang baik. Karena sangat penting menentukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Menurut Edwerd III sumber daya adalah hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan yang baik. Pendekatan sumber daya adalah suatu hal yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan, sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparat atau sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni maka dapat memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya atau penyebab tidak terlaksananya dengan baik pelaksanaan kebijakan.<sup>108</sup>

Berikut yang dimaksud dengan sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia disini yang dimaksud adalah terdapat staff yang bertugas dan bertanggung jawab pada saat pelaksanaan suatu program. Dalam pelaksanaan pelayanan ini yang bertugas adalah sekretariat desa dikarenakan belum terdapat staff yang disediakan. Kepala desa merupakan penanggung jawab kegiatan yang ada di desa Janti. Sedangkan staff desa memiliki tugas melayani masyarakat yang akan menerima BLT.

---

<sup>108</sup> Ibid.,

Berikut hasil wawancara dan observasi di desa Janti dapat dianalisis bahwa sumber daya yang terlibat didalam penyaluran BLT di desa Janti sudah efektif, karena masing-masing mendapatkan tugas dan telah dijalankan dengan baik. Sumber daya disini yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditekankan dengan penelitian hal ini sesuai dengan kriteria sumber daya manusia pada teori Edward III yang mengatakan bahwa walau isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan pelaksanaan tidak akan berjalan dengan efektif.

### 3. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dalam struktur birokrasi yaitu SOP dan Fragmentasi. Karakteristik struktur birokrasi dalam pelaksanaan sistem informasi dijelaskan, yaitu:

#### a. SOP (Standar Operasional Procedur)

SOP merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan karena adanya SOP maka kebijakan dapat dilaksanakan secara jelas dan seragam, karena sudah dapat prosedur yang ditetapkan untuk pedoman pelaksanaan kebijakan.<sup>109</sup> Dapat dianalisis bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Janti berjalan dengan efektif dan baik.

---

<sup>109</sup> Ibid.,

#### b. Fragmentasi

Aparat kebijakan menjelaskan tugasnya saling melengkapi serta mendukung masing-masing dari mereka, sehingga terdapat pola hubungan yang bersifat saling kerjasama. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, bagian-bagian tersebut saling berkerja sama dalam melaksanakan tugas masing-masing, seperti, bagian informasi bertugas untuk menyetorkan data yang terkumpul guna meningkatkan pelayanan pada bagian pengolahan data maupun sebaliknya.<sup>110</sup> Tanggung jawab para aparat desa Janti saling membantu, melengkapi, dan mendukung satu dengan lainnya dengan tujuan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.

#### 4. Disposisi

Menurut Edward III, disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga semua yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi akan muncul diantara pelaku kebijakan, nantinya akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, namun juga dirinya. Mereka tahu kebijakan akan sangat menguntungkan organisasinya dan dirinya. Dimana mereka memiliki pengetahuan dan mereka sudah

---

<sup>110</sup> Ibid.,

mendalami dan memahaminya.<sup>111</sup> Terkait konsep disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam pelaksanaan BLT di desa Janti sudah baik, disertai komitmen dan kesediaan guna mensukseskan program-program desa. Program BLT sangat didukung oleh semua unsur pemerintahan karena mereka merasakan juga dampak serta manfaat yang positif dari kebijakan ini.

Berdasarkan analisis diatas masyarakat desa Janti mendukung sikap Pemerintah Desa dengan adanya pelaksanaan program BLT bagi masyarakat miskin di desa Janti. Pemerintah Desa menetapkan petugas dalam pelaksanaan penyaluran BLT harus bersungguh-sungguh dalam menerapkan kebijakan. Ketegasan ini dalam penentuan masyarakat sesuai dengan kriteria. Aparat Desa Janti sangat semangat pada saat menjalankan tugas mulianya melalui tim pelaksana yang telah diangkat. Disposisi atau sikap pelaksana panitia ini wajib dimiliki setiap pelaksana kebijakan serta harus berkompeten, berkomitmen, serta mempunyai sikap yang bersungguh-sungguh. Hasil wawancara terhadap masyarakat desa penerima manfaat sudah menunjukkan bahwa disposisi pelaksanaan penyaluran BLT desa Janti cukup baik.

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Janti dengan menggunakan 4 indikator bahwa

---

<sup>111</sup> Ibid.,

pelaksanaan program BLT terhadap masyarakat miskin di desa Janti Slahung Ponorogo sudah cukup berjalan dengan baik serta bantuan tersebut sudah tersalurkan kepada masyarakat, walaupun terdapat kelemahan atas ketidakjelasan pemberian informasi dan konsisten waktu dalam penyaluran bantuan kepada KPM pada saat pelaksanaan program, namun pemerintah desa Janti sudah berupaya penuh memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga program ini dapat terlaksana dengan semestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **B. Analisis Kendala Yang Dialami Pada Saat Penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) Di Desa Janti**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ketentuan mengenai kriteria, teknik pendataan, penetapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT desa dan pelaksanaan pemberian BLT desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.<sup>112</sup> Selain itu, kebijakan BLT dana desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Imigrasi (PERMENDES PDIT) Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

---

<sup>112</sup> “Kementerian Keuangan.”

merupakan dasar yuridis dan Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada penduduk miskin di desa, dalam hal ini diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, dan tepat. Tepat maksudnya adalah tepat sasaran penerima, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Berdasarkan paparan data diatas dapat dianalisis bahwa penyaluran BLT di desa Janti terdapat kendala yang dialami, kendala-kendala tersebut terjadi karena ulah masyarakat itu sendiri. Penyaluran BLT dari pusat ke desa lalu ke masyarakat tidak sedikitpun ada kendala karena pemerintahan di desa Janti menindak tegas dan mengutamakan bantuan langsung tunai agar berguna untuk masyarakatnya. Adapun beberapa kendala yang terjadi menurut paparan data diatas bahwa kendala-kendala tersebut terjadi karena masyarakat itu sendiri, terdapat beberapa masyarakat yang menyebabkan adanya kendala penyaluran BLT. Masyarakat tersebut melakukan protes ke pemerintahan desa dikarenakan tidak menerima BLT, namun terdapat beberapa masyarakat yang dianggapnya lebih mampu tetapi menerima BLT.

Menurut pemerintah desa tidak sedikit warga yang melakukan protes ke pemerintahan desa, beberapa warga tersebut melakukan protes karena merasa layak menerima BLT tetapi malah tidak menerima BLT dan membandingkan dirinya dengan orang yang menerima BLT yang dirasa lebih mampu ekonominya. Pemerintah desa menindak tegas para masyarakat yang melakukan protes karena kecemburuan sosial. Pemerintah desa Janti telah

menyalurkan BLT sesuai dengan data-data yang valid dan bagi penerima BLT sudah sesuai dengan kriteria yang ada.

Penyaluran dana BLT ini memang sudah diatur dalam regulasi termasuk pendataan penerima BLT, verifikasi data, dan syarat penerimaannya. Tugas dari pemerintah desa penyaluran BLT adalah menjalankan regulasi atau ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena jika pada saat penyaluran BLT tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan menjadi salah satu bahkan bisa menjadi persoalan hukum. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar bisa dipahami masyarakat semua yang dilakukan Pemerintah Daerah sampai ke tingkat desa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi kendala seperti paparan data diatas pada saat penyaluran maka bisa disampaikan dalam forum. Forum disini disebut forum yang berada dibawah Kementerian Desa, seperti melalui dinas PMD yang akan melapor ke Kementerian.

Mengantisipasi dengan adanya potensi kendala yang dihadapi dalam penyaluran BLT pemerintah harus mampu menyelidiki pelaksanaan penyaluran BLT tersebut. Hal itu ditempuh agar penyaluran BLT benar-benar sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, dapat meminimalisir kegagalan saat penyaluran di desa Janti dan juga masyarakat penerima BLT yang tergerus dengan sulitnya perekonomian ataupun inflasi akan menjadi lebih baik.

P O N O R O G O

### C. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Janti

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Tujuan diselenggarakan kesejahteraan masyarakat adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti pangan, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>113</sup>

Kesejahteraan akan terpenuhi apabila dalam masyarakat suatu daerah menunjukkan keterangan yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan lainnya. Kemudian terjadi pemerataan pendapatan sehingga tidak timbul kecemburuan sosial. Fasilitas pendidikan

---

<sup>113</sup> Diah Mukminatul Hasimi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 85.

di masyarakat yang semakin mudah dan terjangkau sehingga masyarakat akan mendapatkan taraf hidup yang memadai yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Dengan demikian dapat difahami bahwa tiga indikator kesejahteraan ini akan menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan.<sup>114</sup>

Menurut Kotler, indikator kesejahteraan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya melihat kualitas hidup seseorang dari segi materi (pendapatan, kualitas rumah, bahan pangan, pakaian dan sebagainya), kualitas hidup seseorang dari segi fisiknya (kesehatan, lingkungan alam, dan sebagainya), kualitas hidup seseorang dari segi mentalnya (fasilitas pendidikan, lingkungan budaya), dan terakhir kualitas hidup seseorang dari segi spiritualnya (moral, etika). Maka dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari segi materi, fisik, mental, serta spiritual. Dengan demikian, bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan itu sendiri tanpa terganggunya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.<sup>115</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan bahwa penggunaan Bantuan Langsung Tunai sebagian besar dipakai

---

<sup>114</sup> Fadlillah Hertisca, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Driver Grab Di Kota Metro Dengan Model Cibest" (PhD Thesis, IAIN Metro, 2019).

<sup>115</sup> Tuti Indah Sari, "Keberlanjutan Dan Kontribusi Industri Kecil Kerajinan Genteng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin (Studi Kasus Pengrajin Genteng Desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas)" (PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2018), 58–59.

untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Karena jumlah uang yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) minim dan tidak memungkinkan dipakai untuk pengembangan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan penuturan dari sebagian besar KPM BLT tersebut sudah jelas bahwa bantuan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Desa Janti untuk dapat membantu agar dapat bertahan hidup dan menambah pendapatan, sehingga masyarakat miskin tidak menjadi semakin miskin.

Dari dampak penyaluran BLT yang telah disebutkan berarti Bantuan Langsung Tunai ini sangat dinanti-dinanti oleh masyarakat desa Janti. Harapan dari masyarakat desa Janti BLT tersebut harus tetap berjalan agar dapat sedikit membantu atau meringankan ekonomi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain masyarakat pemerintah juga mempunyai harapan dengan adanya program BLT yang berlangsung. Harapan tersebut yaitu:

1. BLT dapat membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan mendasar.
2. BLT dapat mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. BLT dapat meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara di atas, maka peneliti menganalisis, bahwa dampak dana bantuan langsung tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertama bantuan langsung tunai belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Janti Slahung Ponorogo karena dana bantuan langsung tunai yang terbilang sedikit sehingga bantuan ini tidak

dapat menutupi ekonomi masyarakat Janti. Namun bagi masyarakat dengan adanya bantuan ini lebih kurangnya dapat membantu sedikit demi sedikit ekonomi masyarakat. kedua adanya kecemburuan sosial masyarakat yang tidak menerima BLT juga ingin mendapatkan bantuan tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Janti Slahung Ponorogo belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Namun pemerintah desa Janti sudah berupaya penuh memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga program ini dapat terlaksana dengan semestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Beberapa faktor kendala yang terjadi pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Janti ini adalah pada masyarakat itu sendiri. Dimana hal tersebut disebabkan karena kecemburuan sosial yang dialami oleh warga yang tidak menerima BLT. Menurut warga yang tidak menerima BLT penyaluran BLT tersebut tidak adil karena yang menurutnya mampu malah menerima BLT dan yang merasa kurang mampu malah tidak menerima. Namun penyaluran tersebut sudah sesuai karena penerima yang dianggap mampu harta yang dimilikinya adalah milik keluarga lainnya bukan penerima BLT.
3. Mengenei dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo yaitu Bantuan Langsung

Tunai masih belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Janti karena dana bantuan langsung tunai yang terbilang sedikit sehingga bantuan ini tidak dapat menutupi ekonomi masyarakat Janti. Namun bagi masyarakat dengan adanya bantuan ini lebih kurangnya dapat membantu sedikit demi sedikit ekonomi masyarakat.

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Janti, untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih harus diperbaiki lagi. Sebaiknya pemberian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat harus menyeluruh serta jelas dan detail sehingga masyarakat menjadi paham akan bantuan tersebut. Agar masyarakat tidak salah paham terkait bantuan tersebut sehingga bisa mengurangi permasalahan yang ada.
2. Bagi pemerintah Desa Janti Slahung Ponorogo, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk kedepannya harus memberikan arahan kepada warga yang protes karena tidak menerima BLT. Agar nantinya tidak terdapat kecemburuan sosial yang diakibatkan karena perseteruan antarwarga.
3. Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) alangkah lebih baiknya dana bantuan ini digunakan untuk menjaga perekonomian keluarga dan tetap dalam arahan pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Alexander Phuk Tjilen. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi (Kebijakan Publik)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Ambarita, Muharto dan Arisandy. *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Amruddin, H. Muhammad Bahrul Ilmie, Gemala Dewi, Misno, Kamaruddin Arsyad, Hasbi Ash Shiddieqy, Efrita Norman, dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Burhanuddin, Burhanuddin. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Amerika Serikat: Scott Foresman, 1983.
- Daud, Eka Fatmawati, M. Arif Musthofa. *Potensi Dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Zabags Qu Publish, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Dr Syahrudin, S. E. M.Si. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia, 2019.

- Edi Suharto. *Kemiskinan dan Pelindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Elih Yulish. *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jawa Barat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.
- George C. Edwards. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980.
- George Edwards. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran*. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003.
- Grindle. *Politics and Policy Implementasi in The Third World*. London: Jhon Hopkins University Press, 1980.
- Harold D. Lasswell. *Pre-View of Policy Sciences*. New York: American Elsevier, 1971.
- Hayat, Muhammad Nuh, Abdul Fatah Fanani, dan dkk. *Reformasi kebijakan publik: Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- John Dewey. *Logic: The Theory of Inquiry Dewey*. New York: Henry Holt and Company, 1938.
- Kertati, Indra, Harsoyo, Setyohadi Pratomo, Bambang Agus Windu Sancono, M.Daeni, Rahmad Purwanto Widyastomo, Charis Christiani, dkk. *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Maarhaendra Wija Atmaja. *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*. Denpasar: Risalah Bahan Kuliah Huku dan Kebajikan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.
- Mamik, Dr. *Metodologi Kualitatif*. 1 ed. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Mohammad Mufid. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis. Edisi kedua*. Prenada Media, 2021.
- M.Si, Dr Hernimawati. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Jakad Media Publishing, 2018.
- M.Si, Dr Prihati. *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018.
- Pd, Bagus Eko Dono, S. *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*. guepedia, t.t.
- Pressman, J.L dan Aaron Wildavsky. *Implementasi: How Great Expectation in Washington Are Dased in Oakland*. London: California Press, 1973.
- Rahim, Abd Rahman. *CARA PRAKTIS PENULISAN KARYA ILMIAH*. Yogyakarta: Zahir Publishing, t.t.
- Ravyansah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Putu Eka Purnamaningsih, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ni Wayan Ari Sudiartini, dkk. *Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: Get Press, 2022.
- Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy, Secound Edition*. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1975.

Wayne Parsons. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

## 2. Jurnal

Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010).

Akib, Irwan, dan Risfaisal Risfaisal. "Bantuan langsung tunai." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2015).

Anggraini, Yulia. "Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sintang." *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 4 (2020).

Carly Erly Fernando. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minasaha Selatan." *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020).

Donald Van Meter dan Carl E Van Horn. *The Policy Implementation Proces: A Conceptual Framework*. Vol. 6. 4. Administration and Society, 1975.

Fitriani, Hanik. "Pemberdayaan Ekonomi Disabilitas Melalui Batik Ciprat."

*Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022).

Haryanti, Nur Dhillah. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di

Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Tahun 2012." Diakses 4 Oktober 2023.

[http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1-](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/03/JURNAL-DILA.pdf)

[ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/03/JURNAL-DILA.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/03/JURNAL-DILA.pdf).

Hasimi, Diah Mukminatul. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif

ekonomi Islam." *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 1

(2020).

Hasyim Hasanah. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode

pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1

(2017).

Kariono, Junaidi. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur." *Jurnal Administrasi*

*Publik (Public Administration Journal)* 3, no. 1 (2013).

Nurahmawati, Fika, dan Sri Hartini. "Implementasi kebijakan program bantuan

langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa

Cibadak." *JURMA: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif* 4, no. 2 (2020).

Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Lengkong, dan Novie Palar.

"Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 108 (2021).

Suharianto. “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi tentang Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai).” *eJournal Administrasi Negara* 1, no. 4 (2013).

Taufan, Ade. “Peran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik Pada Masa Pandemi Tahun 2022.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 10 (2022).

Ulya, Husna Ni'matul. “Alternatif strategi penanganan dampak ekonomi covid-19 pemerintah daerah Jawa Timur pada kawasan agropolitan.” *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2020).

### 3. Skripsi

Diana, Nabillah Putri. “Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/20021/>.

Hertisca, Fadlillah. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Driver Grab Di Kota Metro Dengan Model Cibest.” PhD Thesis, IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/452/>.

Ilhamdatun, Lulu. “Program dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya mensejahterakan masyarakat selama pandemi Covid-19 di Desa

Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.” PhD Thesis, UIN Mataram, 2021.

Imron, Rosidi. “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi Covid 19.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Meliana, Aulia. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. <http://repository.ummat.ac.id/4269/>.

Mukarrama, Mukarrama. “Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.” PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2022. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24039/>.

Nur Fitri Tsania. “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022.

Rahmadani, Rahmadani. “Implementasi Program Keluarga Harapan Dan Blt Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

Ridha Fitri Amelia. “Analisis Dampak Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Wilayah Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang.” B.S. thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2022.

Sari, Tuti Indah. “Keberlanjutan Dan Kontribusi Industri Kecil Kerajinan Genteng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin (Studi Kasus Pengrajin Genteng Desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas).” PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2018.

Sulaiman, M. Y. “Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Panrannuanku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.” *Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar*, 2021.

#### 4. Internet

Al-Qur'an, t.t.

Bappenas. “Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa.” Diakses 3 Februari 2024.  
<https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2b1/59a/6242b159ae56b332087183.pdf>.

“Data PPKE Masukkan PNS Sebagai Penerima BLT Kemiskinan Eskترم 2023 di Desa.” Diakses 2 Februari 2023.

<https://radarutara.disway.id/read/645682/data-ppke-masukkan-pns-sebagai-penerima-blt-kemiskinan-esktrem-2023-di-desa>.

“Implementasi Kebijakan.” Diakses 26 September 2023.

[https://etheses.uinsgd.ac.id/5566/4/4\\_bab1.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/5566/4/4_bab1.pdf).

JDIH KEMENKEU. “Peraturan Pemerintah Republik In.” Diakses 3 Februari 2024.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/60TAHUN2014PP.HTM>.

“Kementerian Keuangan.” Diakses 25 September 2023.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/40~PMK.07~2020Per.pdf>.

## 5. Wawancara

Edi Prayitno. Wawancara, 17 Oktober 2023.

Jemani. Wawancara, 18 Oktober 2023.

Mariati. Wawancara, 18 Oktober 2023.

Marpi. Wawancara, 3 Oktober 2023.

Misdi. Wawancara, 20 Oktober 2023.

Mutijab. Wawancara, 20 Oktober 2023.

Nur. Wawancara, 3 Oktober 2023.

———. Wawancara, 17 Oktober 2023.

Nyaman. Wawancara, 20 Oktober 2023.

Paniran. Wawancara, 3 Oktober 2023.

Rifki Roi Abidin. Wawancara, 3 Oktober 2023.

Saikun. Wawancara, 18 Oktober 2023.

Sartini. Wawancara, 4 Oktober 2023.

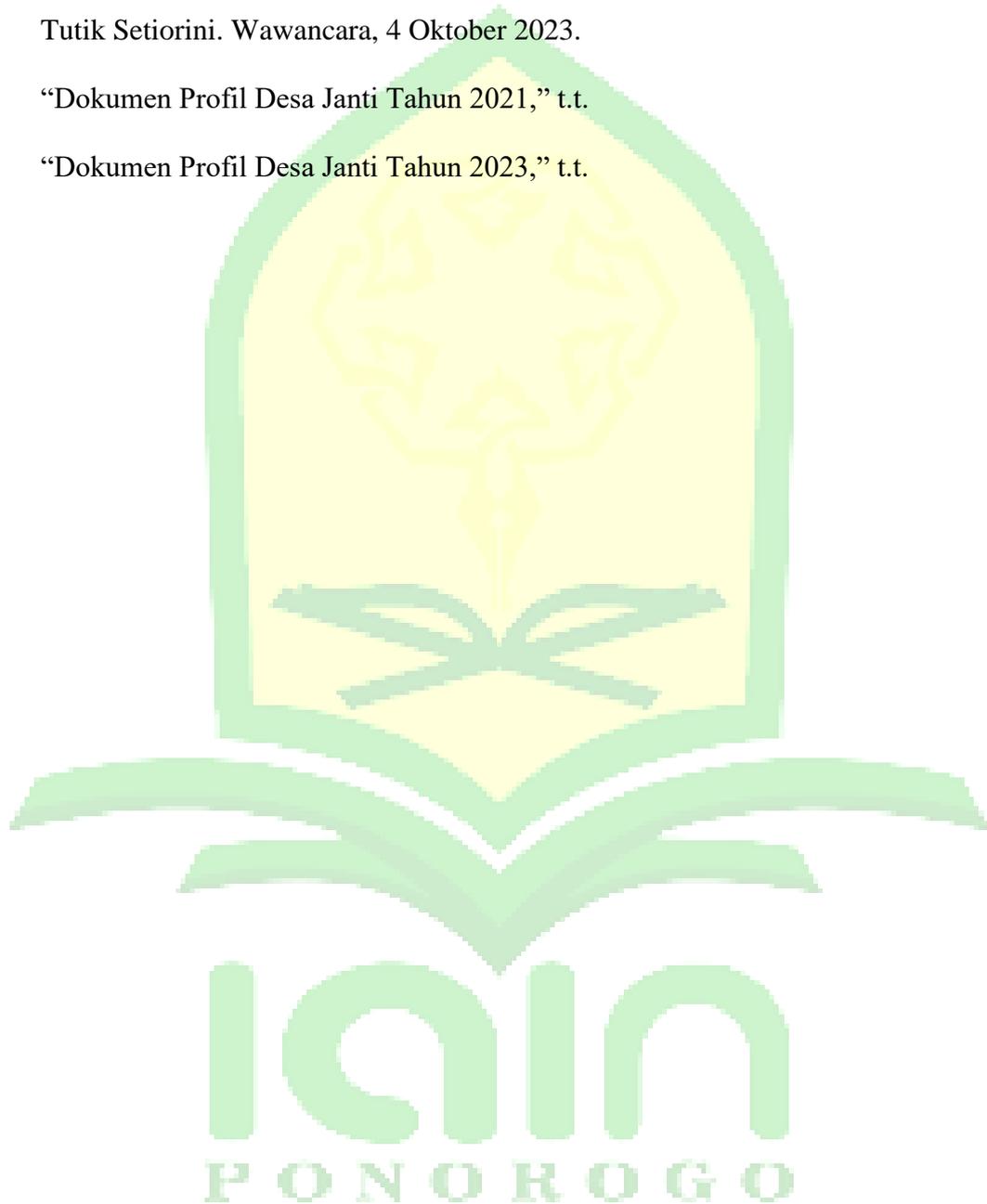
Sati. Wawancara, 20 Oktober 2023.

Tikimun. Wawancara, 20 Oktober 2023.

Tutik Setiorini. Wawancara, 4 Oktober 2023.

“Dokumen Profil Desa Janti Tahun 2021,” t.t.

“Dokumen Profil Desa Janti Tahun 2023,” t.t.





**iaain**  
P O N O R O G O